

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dibuktikan dengan di terapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan tertib sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan suatu daerah serta dapat membuat aset daerah terjaga keutuhannya.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Sedangkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerahnya dapat dilihat dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan pada daerah tersebut.

Pengukuran kinerja keuangan juga dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Ulum (2009) mengatakan akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan menilai kondisi keuangan pemerintah. Untuk menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan berbagai metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan.

Analisis rasio keuangan merupakan alat atau tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah, penggunaan analisis rasio sebagai alat untuk mengukur tingkat kinerja keuangan secara luas juga sudah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia seperti hasil penelitian Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Siak yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan, rasio belanja operasional dan belanja modal dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Siak efisien dalam melakukan pengeluaran untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima pemerintah dan efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang menjadi pembiayaan sendiri dalam membiayai program pemerintah. Selain itu penelitian yang telah dilakukan oleh Pramita (2015) dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Kebumen jika dilihat dari rasio efektivitas PAD dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi keuangan daerah tergolong efisien, rasio keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan lebih besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal, rasio pertumbuhan PAD dan belanja operasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan belanja modal fluktuatif, dan rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah sekali dalam kategori pola hubungan instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dibandingkan Pemerintah Daerah.

Isu tentang kinerja Pemerintah Daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik. Mahsun (2006) mengatakan bahwa

kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Tuntutan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah begitu juga daerah yang berada di Provinsi Riau.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Riau untuk empat Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau yaitu Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis dinyatakan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2019.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 untuk ke-6 kalinya berturut-turut sejak tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan komitmen dan upaya nyata Pemerintah Daerah dalam terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.

Dengan di perolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah dianggap mampu mengolah anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Amin (2015) yang menyatakan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010-2014 terus mengalami perbaikan.

Meskipun telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun beberapa tahun terakhir, sepertinya opini tersebut bertolak belakang dengan fenomena yang ada dilapangan, karena ditemukan cukup banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya atas ketidakpatuhan terhadap

perundang-undangan yang dapat berakibat pada kerugian negara, kekurangan penerimaan, juga ditemukan adanya penyimpangan administrasi, penyimpangan anggaran, penyalahgunaan wewenang serta kasus korupsi yang terus terjadi di Kabupaten Bengkalis. Seperti halnya pada tahun 2018 APBD Kabupaten Bengkalis memiliki nilai sebesar Rp 3,572 Triliun, namun Kerugian Negara yang disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah sebesar Rp 3,4 Miliar. Pada tahun 2019 APBD Kabupaten Bengkalis naik menjadi Rp 3,811 Triliun dan menyebabkan Kerugian Negara sebesar Rp 5,1 Miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis kurang serius dalam melakukan perbaikan kinerja keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan, hal itu dibuktikan dengan adanya temuan yang berulang-ulang dari tahun ketahun. Meskipun ada peningkatan APBD pada tahun 2019, namun juga terdapat peningkatan nilai kerugian negara dalam dua tahun terakhir. Status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini tentunya tidak berbanding lurus dengan kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Bengkalis yang semakin transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, maka dipandang perlu untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan serta kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar dapat memberikan informasi bagi pemangku kepentingan terutama sebagai pembanding untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dimasa yang akan datang. Selain itu diharapkan dengan adanya evaluasi pengelolaan dan pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini kita selaku masyarakat bisa melihat dan menilai sejauh mana Pemerintah Kabupaten Bengkalis mampu dan berhasil untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan baik sehingga akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan analisis rasio keuangan seperti rasio derajat desentralisasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kewenangan dan

tanggung jawab yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah yang bermanfaat untuk mengukur tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat/Provinsi dalam melaksanakan otonomi daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah yang ingin dicapai serta besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan asli daerah tersebut. Kemudian, pengukuran kinerja keuangan juga bisa dilakukan dengan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dalam beberapa tahun anggaran dengan menjaga keseimbangan belanjanya sehingga menjalankan fungsi anggaran sebagai alat alokasi, distribusi dan stabilisasi dengan melakukan perhitungan rasio pertumbuhan dan rasio keserasian belanja, serta menggunakan rasio efisiensi belanja daerah untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penghematan anggaran.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya karena penelitian serupa juga telah dilakukan di Kabupaten lainnya seperti yang dilakukan oleh Nurul Amin (2015), Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019), dan Pramita (2015) yang melakukan pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan, rasio belanja operasional dan belanja modal. Namun, penelitian ini akan berbeda dari penelitian sebelumnya mengingat banyaknya perubahan mengenai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dan rasio keuangan yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis. Adapun rasio keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan dan rasio efisiensi belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diajukan dengan judul “**Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2015-2019**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu pada tahun 2015-2019 jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi?
2. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu pada tahun 2015-2019 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah?
3. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu pada tahun 2015-2019 jika dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi PAD?
4. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu pada tahun 2015-2019 jika dilihat dari rasio keserasian belanja?
5. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu pada tahun 2015-2019 jika dilihat dari rasio pertumbuhan?
6. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu pada tahun 2015-2019 jika dilihat dari rasio efisiensi belanja daerah?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu tahun anggaran 2015-2019. Fokus penelitian ini adalah mengukur kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan dan rasio efisiensi belanja daerah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015-2019 jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015-2019 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015-2019 jika dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi PAD.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015-2019 jika dilihat dari rasio keserasian belanja.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015-2019 jika dilihat dari rasio pertumbuhan.
6. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015-2019 jika dilihat dari rasio efisiensi belanja daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan menambah khasanah kepustakaan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diukur berdasarkan analisis rasio keuangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selain itu penulisan ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi Program Studi DIV-Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak akademisi sebagai bahan masukan yang memiliki manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengambilan keputusan keuangan guna terus meningkatkan dan melakukan perbaikan atas kinerja untuk periode selanjutnya sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian serta definisi konsep dan operasional.

BAB 4 DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan pemaparan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

